



# **2024** **RENCANA KERJA** **(RENJA)**

BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
KOTA SINGKAWANG

<https://bit.ly/RenjaKesbangpolTahun2024>





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 01 A Singkawang Kode Pos 79123 Telp dan Fax (0562) 636989  
Laman [www.kesbangpol.singkawangkota.go.id](http://www.kesbangpol.singkawangkota.go.id) Pos-el : [kesbangpol@singkawangkota.go.id](mailto:kesbangpol@singkawangkota.go.id)

---

SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
NOMOR 000.7.2.4/32/SET-B TAHUN 2023

TENTANG

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu dilakukan penyusunan rencana kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022);

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 11);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 129);
21. Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 130);
22. Keputusan Wali Kota Nomor 000.8.1.1/215/SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian dan Kelompok Subsubstansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
23. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Nomor 000.7.2.2/30/SET-B Tahun 2023 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026;

**MEMUTUSKAN :**

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                       |
| KESATU     | Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Badan Kesbangpol |

adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 1(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berisi:
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun  
Lalu
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkap Daerah
- Bab V Penutup
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 29 Mei 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,  
Kota Singkawang,

ttd

**Drs. BUJANG SUKRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640129 198402 1 002

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris,

  
Sheriy Maya Kartika S.Hut, MEnvMgmt  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770828200003 2 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 01 A Singkawang Kode Pos 79123 Telp dan Fax (0562) 636989  
Laman : [www.kesbangpol.singkawangkota.go.id](http://www.kesbangpol.singkawangkota.go.id). Pos el: [kesbangpol@singkawangkota.go.id](mailto:kesbangpol@singkawangkota.go.id)

---

SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
NOMOR 000.7.2.2/31/SET-B TAHUN 2023  
TAHUN 2023

TENTANG

REVISI  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa ada perubahan kebijakan nasional dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu dilakukan perubahan indikator kinerja utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 11);
13. Keputusan Wali Kota Nomor 000.8.1.1/215/ SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian dan Kelompok Sub-Substansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.
14. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Nomor 000.7.2.2/30/SET-B TAHUN 2023 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam :

- : 1. Perencanaan dan penyusunan Rencana Kinerja (Renja);
2. Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
4. Penyusunan Laporan Kinerja;
5. Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026;
6. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang, melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang  
pada tanggal : 29 Mei 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,  
Kota Singkawang,

ttd

**Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.196401291984021002



Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris,

Sherly Maya Kartika, S.Hut, MEnvMgmt  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19730828200003 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG.  
NOMOR : 000.7.2.2/31/SET-B TAHUN 2023  
TANGGAL : 29 MEI 2023  
TENTANG : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2023 - 2026 BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

- Tugas Pokok : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan politik;  
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;  
3. Pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;  
4. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

| Tujuan RPD<br>Pemerintah Kota<br>Singkawang                                                                                                                     | Indikator<br>Tujuan | Tujuan<br>Badan<br>Kesbangpol                                                                                     | Indikator<br>Tujuan                                                                                                  | Sasaran                                                                                       | Indikator                                                            | Penjelasan                                                                                                              | Target kinerja |      |      |      | Akhir<br>Renstra |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------------------|
|                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                         | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 |                  |
| Meningkatnya tata<br>kelola<br>pemerintahan yang<br>baik melalui<br>penguatan fungsi<br>pelayanan publik<br>yang berbasis<br>inovasi dan<br>teknologi informasi | Indeks<br>Toleransi | Meningkatnya<br>kualitas<br>kehidupan<br>masyarakat<br>yang<br>harmonis,<br>kondusif,<br>toleran dan<br>berbudaya | Potensi<br>kejadian<br>konflik<br>terkait<br>ideologi,<br>politik,<br>ekonomi,<br>sosial<br>budaya,<br>dan<br>hankam | Meningkatnya<br>Reformasi<br>Birokrasi dan<br>Akuntabilitas<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Kategori<br>Capaian<br>Reformasi<br>Birokrasi<br>Perangkat<br>Daerah | Kategori Capaian<br>Reformasi Birokrasi<br>Perangkat Daerah<br>Hasil Evaluasi RB<br>oleh Inspektorat Kota<br>Singkawang | BB             | BB   | BB   | BB   | BB               |
|                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | Kategori<br>Capaian<br>SAKIP<br>Perangkat<br>Daerah                  | Kategori Capaian<br>SAKIP Perangkat<br>Daerah<br>Hasil Evaluasi SAKIP<br>oleh Inspektorat Kota<br>Singkawang            | BB             | BB   | BB   | BB   | BB               |
|                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                      | Meningkatnya<br>wawasan<br>nusantara                                                          | Aspek<br>Panca<br>Gatra                                              | Penerapan 5(lima)<br>aspek panca gatra<br>Tipe<br>pengukuran :<br>Kumulatif                                             | -              | 5    | 5    | 5    | 5                |

Ditetapkan di : Singkawang  
pada tanggal : 29 Mei 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,  
Kota Singkawang,

ttd

**Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.196401291984021002



Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris,

Sherly Maya Kartika, S.Hut, MEnvMgmt  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19730828200003 2 004

**PENJELASAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

| No | Tujuan                                                                                       | Sasaran                                                                     | Indikator                                              | Penjelasan                                                                                                                                                                                       | Target Kinerja Pada Tahun |      |      |      | Akhir Renstra | Pengampu                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|---------------|------------------------------------|
|    |                                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                  | 2023                      | 2024 | 2025 | 2026 |               |                                    |
| 1  | 2                                                                                            | 3                                                                           | 4                                                      | 5                                                                                                                                                                                                | 6                         | 7    | 8    | 9    | 10            | 11                                 |
|    | Meningkatkatnya Kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategorei Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah<br><br>Hasil Evaluasi RB oleh Inspektorat Kota                                                                                             | BB                        | BB   | BB   | BB   | BB            | Subbag Umum, Kepegwaian dan Aset   |
|    |                                                                                              |                                                                             | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah                | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah<br><br>Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang                                                                                             | BB                        | BB   | BB   | BB   | BB            | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah |
|    |                                                                                              | Meningkatnya wawsan nusantara                                               | Aspek Panca Gatra                                      | Ideologi. Kini Ideologi Pancasila dan Konstitusi menghadapi tantangan kewaspadaan dengan maraknya kembali ideologi ekstrim khilafah dan komunis serta gerak politik kelompok oligark yang rakus; | -                         | 4    | 4    | 4    | 4             | Bidang Kesatuan Bangsa             |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Penjelasan                                                                                                                                                                                                 | Target Kinerja Pada Tahun |      |      |      | Akhir Renstra | Pengampu |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|---------------|----------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                            | 2023                      | 2024 | 2025 | 2026 |               |          |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                          | 6                         | 7    | 8    | 9    | 10            | 11       |
|    |        |         |           | Ekonomi. Kondisi ekonomi nasional Tahun 2023 semakin suram ditambah kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar, beban hutang yang semakin memberatkan yang belum ada jalan penyelesaian tepat dan strategis; |                           |      |      |      |               |          |
|    |        |         |           | Budaya. Terkikisnya budaya bangsa yang mengedepankan sifat gotong-royong, rasa saling menghormati dan menghargai sebagai sesama anak bangsa;                                                               |                           |      |      |      |               |          |

| NO | Tujuan | Sasaran | Indikator | Penjelasan                                                                                                                                                                                                              | Target Kinerja Pada Tahun |      |      |      | Akhir Renstra | Pengampu                                                  |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                         | 2023                      | 2024 | 2025 | 2026 |               |                                                           |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                       | 6                         | 7    | 8    | 9    | 10            | 11                                                        |
|    |        |         |           | Sosial. Kondisi permasalahan sosial yang dapat mengarah ke konflik sosial, karena dipicu dari lemahnya ideologi, perbedaan pilihan politik, kesenjangan ekonomi dan lemahnya penegakkan hukum                           |                           |      |      |      |               |                                                           |
|    |        |         |           | Politik Tahun 2023, NKRI menghadapi tantangan kewaspadaan, pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa, karena maraknya tuduhan politik identitas yang menebarkan <i>divide et impera</i> (memecah belah dan mengadu domba); | -                         | 1    | 1    | 1    | 1             | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan |



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 01 A Singkawang Kode Pos 79123 Telp dan Fax (0562) 636989  
Laman [www.kesbangpol.singkawangkota.go.id](http://www.kesbangpol.singkawangkota.go.id) Pos el : [kesbangpol@singkawangkota.go.id](mailto:kesbangpol@singkawangkota.go.id)

---

SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
NOMOR 000.7.2.4/23/SET-B TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 akuntabel, terarah dan terpadu, perlu membentuk Tim;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
  13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);
  14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022);
  15. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

Pengarah, bertugas :

- a. Mengarahkan Tim untuk menyampaikan data kinerja, usulan program dan kegiatan berdasarkan tugas fungsi masing-masing;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2023;
- c. Bertanggungjawab atas realisasi dan akuntabilitas pencapaian data kinerja;
- d. Menetapkan RENJA Tahun 2024.

1. Ketua, bertugas :

- a. Mengendalikan dan mengkoordinir Tim untuk pelaksanaan pembahasan penyempurnaan dan perubahan RENJA Tahun 2024;
- b. Mengevaluasi pengajuan program kegiatan Tahun 2023 dari masing-masing Koordinator;
- c. Menganalisa dan memberi masukan kepada Pengarah untuk penyempurnaan RENJA Tahun 2024.
- d. Bertanggungjawab berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyelesaian RENJA Tahun 2024.

2. Koordinator, bertugas :

- a. Mengarahkan, menganalisa dan memverifikasi usulan data kinerja masing-masing sesuai tugas fungsi;
- b. Mengumpulkan dan menyampaikan dan perubahan RENJA Tahun 2024;
- c. Melakukan perbaikan sesuai pembahasan sebelum ditetapkan oleh Kepala Badan selaku Pengarah;
- d. Melaporkan dan menyajikan penjelasan tercapai dan/atau tidak tercapainya data kinerja;
- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pelaksanaan RENJA Tahun 2024.

3. Anggota bertugas :

- a. Mengajukan usulan kegiatan data kinerja, sesuai gugus tugas fungsi kepada Koordinator guna kesempurnaan penyusunan data kinerja dan RENJA Tahun 2024;

- b. Mengumpulkan dan menyampaikan penjelasan data kinerja sebagai bahan penyusunan RENJA Tahun 2024 secara terukur dan terarah berdasarkan tugas fungsi masing-masing;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pencapaian data kinerja, usulan program dan kegiatan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang, melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang, melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

Ditetapkan di : Singkawang  
pada tanggal : 3 Maret 2023

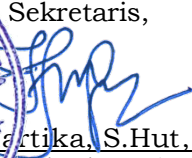
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,  
Kota Singkawang,

ttd

**Drs. H. Bujang Sukri, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196401291984021002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris,  
  
  
**Sherly Maya Kartika, S.Hut, MEnvMgmt**  
Pemula Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19730828200003 2 004

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA SINGKAWANG  
000.7.2.4/23/SET-B TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SINGKAWANG  
TANGGAL 3 MARET 2023

SUSUNAN TIM

| No | Nama/ NIP                                                                                               | Jabatan                                                        | Kedudukan<br>Dalam Tim |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                                                                                       | 3                                                              | 4                      |
| 1. | <b>Drs. H. Bujang Sukri, M.Si</b><br>NIP. 19401201984021002<br>Pembina Utama Muda (IV/c)                | Plt. Kepala Badan                                              | Pengarah               |
| 2. | <b>Sherly Maya Kartika, S.Hut, MEnv, Mgmt</b><br>NIP. 19730828 200003 2 004<br>Pembina Tingkat I (IV/b) | Sekretaris                                                     | Ketua                  |
|    | <b>Suryani, SH</b><br>NIP. 19711111 199603 2 008<br>Penata Tk.I (III/d)                                 | Kepala Subbagian<br>Umum dan<br>Kepegawaian                    | Anggota                |
| 3. | <b>Ferry Febriansyah, SE</b><br>NIP. 19670212 199403 1 009                                              | Kepala Bidang<br>Kesatuan Bangsa                               | Koordinator            |
|    | <b>Siti Maisarah, SHi</b><br>NIP. 19660519 198612 2 001<br>Penata TK.I (III/d)                          | Penggerak Swadaya<br>Masyarakat                                | Anggota                |
|    | <b>Dra. Elina</b><br>NIP. 19670806 199303 2 008<br>Penata Tk. I ( III/d)                                | Penggerak Swadaya<br>Masyarakat                                | Anggota                |
| 4. | <b>Drs. Rahmat, M.Si</b><br>NIP. 19660225 199401 1 001<br>Pembina (IV/a)                                | Kabid Politik Dalam<br>Negeri dan Organisasi<br>Kemasyarakatan | Koordinator            |
|    | <b>Redy Pranowo, SH</b><br>NIP. 19670922 200003 1 002<br>Penata Tk.I (III/d)                            | Penggerak Swadaya<br>Masyarakat                                | Anggota                |

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,  
Kota Singkawang,

ttd

**Drs. H. Bujang Sukri M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196401291984021002



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNYA, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024 telah tersusun. Hal ini tidak terlepas dari peran serta seluruh ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penyusunan Renja ini.

Renja Tahun 2024 ini merupakan implementatif dokumen Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 – 2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 000.7.2.2/32/SET-B Tahun 2023 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026. Renja ini disusun dengan memperhatikan penyelarasan terhadap perubahan kebijakan pusat dan daerah di urusan pemerintahan umum, khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik.

Tak luput pula merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Semoga Renja Tahun 2024 ini bermanfaat dan menjadi pedoman umum dalam pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

Singkawang, 29 Mei 2023

Pt. Kepala Badan,



**Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.196401291984021002

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kata Pengantar.....</b>                                                                                                                 | <b>i</b>   |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                                                                                                     | <b>ii</b>  |
| <b>Daftar Tabel.....</b>                                                                                                                   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                           | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                                                                                   | 1          |
| 1.2. Landasan Hukum.....                                                                                                                   | 2          |
| 1.3. Maksud dan tujuan.....                                                                                                                | 5          |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....                                                                                                            | 5          |
| <b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022...</b>                                                                  | <b>7</b>   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian<br>Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota<br>Singkawang Tahun 2018-2022..... | 7          |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa<br>dan Politik Kota Singkawang.....                                                   | 15         |
| 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.....                           | 19         |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....                                                                                              | 23         |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                                                                 | 33         |
| <b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>                                                                            | <b>34</b>  |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....                                                                                              | 34         |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik...                                                                                | 35         |
| 3.3 Program dan Kegiatan.....                                                                                                              | 41         |
| <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>                                                                                          | <b>52</b>  |
| 4.1. Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota<br>Singkawang yang mendukung Prioritas Provinsi Kalimantan<br>Barat.....             | 53         |
| 4.2 Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota<br>Singkawang .....                                                                   | 53         |
| <b>BAB V    PENUTUP.....</b>                                                                                                               | <b>54</b>  |

## DAFTAR TABEL

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 2.1</b><br><b>(T-C.29)</b> | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Pencapaian RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Tahun 2022.....                         | 10 |
| <b>Tabel 2.2</b>                    | Skala Nilai Peringkat Kinerja.....                                                                                                                                                              | 15 |
| <b>Tabel 2.3</b>                    | Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026 Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... | 15 |
| <b>Tabel 2.4</b><br><b>(T-C.30)</b> | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Terhadap RENSTRA Tahun 2023 - 2026.....                                                                          | 16 |
| <b>Tabel 2.5</b><br><b>(T-C.30)</b> | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Terhadap Revisi RENSTRA Tahun 2023 - 2026.....                                                                   | 17 |
| <b>Tabel 2.6</b>                    | Capaian Kinerja Keormasan Tahun 2022.....                                                                                                                                                       | 19 |
| <b>Tabel 2.7</b><br><b>(T-C.31)</b> | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Singkawang .....                                                                                                                 | 24 |
| <b>Tabel 2.8</b><br><b>(T-C.32)</b> | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pemerintah Kota Singkawang.....                                                                                           | 33 |
| <b>Tabel 3.1</b>                    | Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026.....                                                                                                  | 36 |
| <b>Tabel 3.2</b>                    | Keterkaitan Tujuan RPD dan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.....                                                        | 37 |
| <b>Tabel 3.3</b>                    | Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.....                                                                                   | 38 |
| <b>Tabel 3.4</b><br><b>(T-C.33)</b> | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan/Subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Kota Singkawang.....                                     | 45 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Revisi Renstra Tahun 2024 - 2026 sebagai wujud dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024. Renja Tahun 2024 mempunyai arti strategis dan hasil dari musyawarah, koordinasi serta beberapa kali pengevaluasian demi pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif, terarah dan terkoordinasi melalui pemikiran dan gagasan positif dalam Revisi Renstra Tahun 2024 - 2026 yang telah ditetapkan.

Nilai strategis Renja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup :

1. Renja menjadi dokumen yang secara substansial menjabarkan tujuan, sasaran dan program/kegiatan/subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti yang ditetapkan dalam Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Singkawang;
2. Renja merupakan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2024;
3. Renja menjadi salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Perencanaan serta penetapan target yang akurat RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentunya akan mempermudah pengukuran pencapaian sasaran dan tujuan dalam akhir periode tahunan nantinya, sehingga akan mempermudah pula dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024 serta melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan pada Renja Tahun 2024. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan implementasi tahun ke-1 dari Revisi Renstra Tahun 2023 - 2026 yang akan dicantumkan dalam

KUA dan PPAS Tahun 2024 dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang dirujuk dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah ;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
24. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 11);

26. Keputusan Wali Kota Nomor 000.8.1.1/215/ SETDA.OR-A Tahun 2024 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian dan Kelompok Sub-Substansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
27. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 000.7.2.2/30/ SET-B Tahun 2024 tentang Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang dan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi bidang – bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam pencapaian program/kegiatan/subkegiatan Tahun 2024 sesuai dengan pelimpahan tugas pokok dan fungsi yang baru di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

Tujuan disusunnya Renja adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolak ukur pencapaian penilaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan/subkegiatan dalam penyusunan rencana anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi informasi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022**, berisi informasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN**, berisi informasi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**, berisi informasi Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mendukung Prioritas Provinsi Program dan Kegiatan, Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Renja dan Pendanaan pada Tahun 2024.

**BAB V PENUTUP** memuat motivasi dan upaya menumbuhkan komitmen dan konsistensi penerapan Renja di kalangan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022**

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. *Output* atau hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah penting.

Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.

Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran. Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan penganggaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, alokasi pendanaan indikatif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program/kegiatan /subkegiatannya, dalam hal ini dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Kota Singkawang dalam menyusun rancangan kebijakan.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan /subkegiatannya yang tidak memenuhi target, yang telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2022.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2022 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Data Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2022, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan tugas fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.920.242.438,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Secara keseluruhan, APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 mengalami penambahan anggaran berkisar 7,46% atau sejumlah Rp 272.102.402,- dari Tahun 2021. Sebaran alokasi anggaran yang meningkat secara signifikan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yaitu Rp 169.618.800,- atau sekitar 544,62% dari APBD Induk Tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan **Launching Moderasi Beragama** di Kota Singkawang.

Evaluasi yang dibahas pada Bab II ini memperhatikan target-target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022. Namun, ketika diberlakukannya Keputusan Wali Kota Nomor 000.8.1.1/215/ SETDA.OR-A Tahun 2024 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian dan Kelompok Sub-Substansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang maka terjadi perubahan pelimpahan kewenangan, tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang kemudian menindaklanjuti perubahan tersebut dengan melakukan penyusunan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026. Bertambahnya pelimpahan kewenangan, tugas dan fungsi, berkonsekuensi pada penyesuaian kembali (*re-cascade*) target - target kinerja termasuk perumusan kembali penyesuaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 diukur sesuai dengan pernyataan Indikator Kinerja Utama (IKU), sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam pencapaian realisasi 4 (empat) sasaran strategis dengan antara :

- 1) Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun anggaran;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hal ini ditempuh untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program pada Revisi RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 - 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 (T-C.29)**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Pencapaian RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Tahun 2022

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )                                                                      | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Tahun 2018-2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                            |                       | Target Prog/Keg RENJA Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Tahun 2024 |                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                      | Target Renja Tahun 2022                                      | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                  | Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024                       | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1)                 | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                            | (4)                                                                                        | (5)                                                                  | (6)                                                          | (7)                        | (8)                   | (9)                              | 10=(5+7+9)                                                                | 11 = (10/4)                                  |
| <b>8.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                             | <b>5,377,395,355</b>                                                                       | <b>2,426,402,693</b>                                                 | <b>2,598,484,479</b>                                         | <b>2,482,101,976</b>       | <b>95.7%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| <b>8.01.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>                                                  | <b>90,517,926</b>                                                                          | <b>16,298,075</b>                                                    | <b>4,028,200</b>                                             | <b>4,028,200</b>           | <b>100%</b>           | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.01.2.01.01     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | -Jumlah Dokumen DPA<br>- Jumlah Dokumen Perjankin<br>- Jumlah Dokumen RENJA<br>- Jumlah Dokmumen RKA                                           | 33,054,320                                                                                 | 3,040,700                                                            | 1,148,800                                                    | 1,148,800                  | 100%                  | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| 8.01.01.2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | -Jumlah Dokumen LAKIP<br>-Jumlah Dokumen LKPJ<br>-Jumlah Dokumen LPPD                                                                          | 25,679,452                                                                                 | 11,893,350                                                           | 861,600                                                      | 861,600                    | 100%                  | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| 8.01.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | - Jumlah Dokumen Evaluasi Renja<br>- Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra<br>- Jumlah Kegiatan Penilaian Anjab<br>- Jumlah Kegiatan Penilaian PMPRB | 31,784,154                                                                                 | 1,364,025                                                            | 2,017,800                                                    | 2,017,800                  | 100%                  | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| <b>8.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan</b>                                                                                            | <b>4,569,318,173</b>                                                                       | <b>2,111,747,033</b>                                                 | <b>2,255,146,400</b>                                         | <b>2,155,584,816</b>       | <b>97.2%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Aparatur yang di sediakan Gaji dan Tunjangannya                                                                                         | 4,375,480,002                                                                              | 2,025,146,333                                                        | 2,166,118,000                                                | 2,070,106,416              | 95.6.6%               | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| 8.01.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Cakupan Penyediaan Administrasi Tugas ASN                                                                                                      | 184,442,391                                                                                | 82,685,000                                                           | 88,620,000                                                   | 85,070,000                 | 96.0%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| 8.01.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun                                                                                                    | 9,395,780                                                                                  | 3,915,700                                                            | 408,400                                                      | 408,400                    | 100%                  | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )                                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Tahun 2018-2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                            |                       | Target Prog/Keg RENJA Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Tahun 2024 |                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                            |                                                                      | Target Renja Tahun 2022                                      | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                  | Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024                       | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1)                 | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                       | (4)                                                                                        | (5)                                                                  | (6)                                                          | (7)                        | (8)                   | (9)                              | 10=(5+7+9)                                                                | 11 = (10/4)                                  |
| <b>8.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian</b>                                                    | <b>50,000,000</b>                                                                          | <b>14,529,000</b>                                                    | <b>9,912,942</b>                                             | <b>9,912,600</b>           | <b>100%</b>           | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                            | 50,000,000                                                                                 | 14,529,000                                                           | 9,912,942                                                    | 9,912,600                  | 100%                  | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| <b>8.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum</b>                                                           | <b>353,348,528</b>                                                                         | <b>139,391,605</b>                                                   | <b>141,516,400</b>                                           | <b>136,210,711</b>         | <b>87.5%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor untuk 12 bulan                 | 11,432,389                                                                                 | 4,180,000                                                            | 2,196,000                                                    | 1,551,000                  | 70.6%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| 8.01.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                      | 53,423,200                                                                                 | 49,785,960                                                           | 59,732,600                                                   | 56,577,800                 | 94.7%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| 8.01.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk 12 bulan                                            | 19,419,939                                                                                 | 2,310,000                                                            | 4,239,000                                                    | 3,682,800                  | 86.9%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| 8.01.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                          | 7,938,000                                                                                  | 3,720,000                                                            | 4,348,800                                                    | 3,720,000                  | 85.5%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| 8.01.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                                               | 261,135,000                                                                                | 79,395,645                                                           | 71,000,000                                                   | 70,679,111                 | 99.5%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| <b>8.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang</b>                                                               | <b>276,106,728</b>                                                                         | <b>118,584,651</b>                                                   | <b>161,883,479</b>                                           | <b>150,373,249</b>         | <b>89.6%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Cakupan penyediaan jasa surat menyurat                                                                    | 3,003,000                                                                                  | 610,000                                                              | 870,000                                                      | 724,000                    | 83.2%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| 8.01.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Cakupan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                            | 139,345,048                                                                                | 56,678,291                                                           | 77,640,000                                                   | 67,991,601                 | 87.6%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| 8.01.01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                             | 133,758,680                                                                                | 61,296,360                                                           | 83,373,479                                                   | 81,657,648                 | 97.9%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| <b>8.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                            | <b>88,104,000</b>                                                                          | <b>40,381,329</b>                                                    | <b>35,910,000</b>                                            | <b>35,905,000</b>          | <b>100%</b>           | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.01.2.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 73,584,000                                                                                 | 34,721,329                                                           | 24,360,000                                                   | 24,355,000                 | 100%                  | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )                                                                                                                                                                                                                         | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2022) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                            |                       | Target Prog/Keg RENJA Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Tahun 2024 |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                      | Target Renja Tahun 2022                                      | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                  | Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024                       | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1)                 | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4)                                                                                        | (5)                                                                  | (6)                                                          | (7)                        | (8)                   | (9)                              | 10=(5+7+9)                                                                | 11 = (10/4)                                  |
| 8.01.01.2.09.10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                     | Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                        | 14,520,000                                                                                 | 5,660,000                                                            | 11,550,000                                                   | 11,550,000                 | 100%                  | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| <b>8.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>95,651,700</b>                                                                          | <b>17,728,646</b>                                                    | <b>60,518,700</b>                                            | <b>50,929,900</b>          | <b>84.2%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| <b>8.01.02.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                                                                                                         | <b>Persentase perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</b>                                                                                                                                                                         | <b>95,651,700</b>                                                                          | <b>17,728,646</b>                                                    | <b>60,518,700</b>                                            | <b>50,929,900</b>          | <b>84.2%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.02.2.01.04     | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemabauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                           | Jumlah sosialisasi kebijakan peraturan revolusi mental, wawasan kebangsaan dan bela negara serta pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila, Kesaktian Pancasila dan bela negara                                                                                                                 | 95,651,700                                                                                 | 17,728,646                                                           | 60,518,700                                                   | 50,929,900                 | 84.2%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| <b>8.01.03</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                          | <b>Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,963,999,481</b>                                                                       | <b>966,346,670</b>                                                   | <b>998,653,517</b>                                           | <b>996,184,340</b>         | <b>98.8%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| <b>8.01.03.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> | <b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> | <b>1,963,999,481</b>                                                                       | <b>966,346,670</b>                                                   | <b>998,653,517</b>                                           | <b>996,184,340</b>         | <b>98.8%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.03.2.01.03     | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                           | Jumlah Berkas Laporan pertanggungjawaban keuangannya (SPJ) Partai yang terverifikasi                                                                                                                                                                                                              | 1,858,303,003                                                                              | 912,267,740                                                          | 912,796,917                                                  | 912,267,740                | 99.9%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )                                                            | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Tahun 2018-2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                            |                       | Target Prog/Keg RENJA Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Tahun 2024 |                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                      | Target Renja Tahun 2022                                      | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                  | Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024                       | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1)                 | (2)                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                                  | (4)                                                                                        | (5)                                                                  | (6)                                                          | (7)                        | (8)                   | (9)                              | 10=(5+7+9)                                                                | 11 = (10/4)                                  |
| 8.01.03.2.01.04     | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang politik                                                                           | 99,160,770                                                                                 | 54,078,930                                                           | 85,856,600                                                   | 83,916,600                 | 97.7%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| <b>8.01.04</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan berbadan hukum</b>                                                                        | <b>68,715,644</b>                                                                          | <b>25,880,000</b>                                                    | <b>15,261,800</b>                                            | <b>13,161,800</b>          | <b>86.2%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| <b>8.01.04.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                     | <b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b> | <b>68,715,644</b>                                                                          | <b>25,880,000</b>                                                    | <b>15,261,800</b>                                            | <b>13,161,800</b>          | <b>86.2%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.04.2.01.03     | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pembayaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                           | Jumlah Hibah yang diserahkan kepada Ormas<br><br>Jumlah Sosialisasi Peraturan Keormasan Maintenance Aplikasi Ormas (SIPPO)           | 54,680,000                                                                                 | 25,880,000                                                           | 15,261,800                                                   | 13,161,800                 | 86.2%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| <b>8.01.05</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                                                                                               | <b>PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP FORUM, PELAJAR DAN MASYARAKAT</b>                                                       | <b>39,229,000</b>                                                                          | <b>12,440,800</b>                                                    | <b>128,763,200</b>                                           | <b>127,963,200</b>         | <b>99.7%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| <b>8.01.05.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                                                                                      | <b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                  | <b>39,229,000</b>                                                                          | <b>12,440,800</b>                                                    | <b>128,763,200</b>                                           | <b>127,963,200</b>         | <b>99.7%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.05.2.01.04     | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                  | Jumlah Kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan peningkatan ketahanan ekonomi<br><br>Jumlah Kegiatan Koordinasi FKUB          | 39,229,000                                                                                 | 12,440,800                                                           | 128,763,200                                                  | 127,963,200                | 100%                  | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |

| Kode                                                               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )                                                  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Tahun 2018-2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                            |                       | Target Prog/Keg RENJA Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Tahun 2024 |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                      | Target Renja Tahun 2022                                      | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                  | Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024                       | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1)                                                                | (2)                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                        | (4)                                                                                        | (5)                                                                  | (6)                                                          | (7)                        | (8)                   | (9)                              | 10=(5+7+9)                                                                | 11 = (10/4)                                  |
| <b>8.01.06</b>                                                     | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                       | <b>PERSENTASE PENANGANAN POTENSI KONFLIK</b>                                                                               | <b>55,353,800</b>                                                                          | <b>0</b>                                                             | <b>36,647,800</b>                                            | <b>32,252,800</b>          | <b>88.5%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| <b>8.01.06.2.01</b>                                                | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                         | <b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b> | <b>55,353,800</b>                                                                          | <b>0</b>                                                             | <b>36,647,800</b>                                            | <b>32,252,800</b>          | <b>88.5%</b>          | <b>100.00%</b>                   | <b>100.00%</b>                                                            | <b>100.00%</b>                               |
| 8.01.06.2.01.04                                                    | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi FKDM                                                                                            | 55,353,800                                                                                 | 0                                                                    | 36,647,800                                                   | 32,252,800                 | 88.5%                 | 100.00%                          | 100.00%                                                                   | 100.00%                                      |
| <b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM/KEGIATAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                      | <b>3,838,329,496</b>                                         | <b>3,702,594,016</b>       | <b>92.19%</b>         |                                  |                                                                           |                                              |

Sumber : Evaluasi Kinerja Renja Tahun 2022, 2022

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang kepada Wali Kota Singkawang pada Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1.  | $91 \leq 100$                    | Sangat baik                          |      |
| 2.  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |      |
| 3.  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |      |
| 4.  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |      |
| 5.  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |      |
| 6.  | 0                                | Tidak ada data                       |      |

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun capaian kinerja Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
Capaian Kinerja Tahun 2022  
terhadap Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026

| No. | Sasaran Strategis                                                           | Indikator Kinerja Utama                               | Target Perjanjian Tahun 2022 | Realisasi Perjanjian Tahun 2022 | (%)                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                     | 4                            | 5                               | $6 = 5/4 \times 100\%$                |
| 1.  | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | BB                           | C (Buruk)                       | 14,05<br>(LHE Inspektorat Tahun 2021) |
|     |                                                                             | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | BB                           | B (Baik)                        | 66,95<br>(LHE Inspektorat Tahun 2021) |
| 2.  | Meningkatnya kerukunan masyarakat                                           | Angka Konflik                                         | 0                            | 0                               | Tidak ada data                        |
| 3.  | Meningkatnya kesadaran politik Masyarakat                                   | Persentase Partisipasi Pemilih                        | 0%                           | 0%                              | Tidak ada data                        |
| 4   | Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan                  | Persentase Ormas Aktif Terdaftar                      | 68%                          | 48,73%                          | 28,34%                                |

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja, 2022

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila merujuk Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 23 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 - 2026 serta Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026, maka pencapaian kinerja yang diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 2.4 (T-C.30)**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang  
Terhadap RENSTRA Tahun 2023 - 2026

| No  | Indikator     | SPM/Standar Nasional | IKK                                                   | Target Renstra Tahun 2018 - 2022 | Target Renstra Tahun 2023 - 2026 |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis                                          |
|-----|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|     |               |                      |                                                       | Tahun 2022                       | Tahun 2023                       | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022        | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |                                                           |
| (1) | (2)           | (3)                  | (4)                                                   | (5)                              | (6)                              | (7)        | (8)        | (9)               | (10)       | (11)       | (12)       | (13)                                                      |
| 1.  | Angka konflik | -                    | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | C                                | BB                               | BB         | BB         | C (Buruk)         | -          | BB         | BB         | Sekretariat                                               |
|     |               |                      | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | -                                | BB                               | BB         | BB         | CC Cukup Memadai) | -          | BB         | BB         | Sekretariat                                               |
| 2.  |               |                      | Angka potensi kejadian konflik sosial                 | -                                | 5                                | 4          | 3          | 0                 | -          | 4          | 3          | Bidang Kesatuan Bangsa                                    |
| 3.  |               |                      | Persentase Partisipasi Pemilih                        | -                                |                                  | 70%        |            | 0%                | -          | 70%        |            | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan |
| 4.  |               |                      | Persentase Ormas Aktif Terdaftar                      | 75,51%                           | 75%                              | 78%        | 80%        | 48,73%            | -          | 78%        | 80%        | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan |

Sumber : SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. 22 Tahun 2022 tentang Renstra Tahun 2023 - 2026

Namun sejak diterbitkannya Keputusan Wali Kota Nomor 000.8.1.1/215/ SETDA.OR-A Tahun 2024 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian dan Kelompok Sub-Substansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang, maka dilakukan perubahan (revisi) atas Renstra. Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 000.7.2.2/30/SET-B Tahun 2023 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 000.7.2.2/31/SET-B Tahun 2023 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang, maka pencapaian kinerja tergambar sebagai berikut :

**Tabel 2.5 (T-C.30)**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang  
Terhadap Revisi RENSTRA Tahun 2024-2026

| No  | Indikator        | SPM/Standar Nasional | IKK                                                   | Target Renstra Tahun 2018 - 2022 | Target Renstra Tahun 2023 - 2026 |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis                                                                     |
|-----|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                      |                                                       | Tahun 2022                       | Tahun 2023                       | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022        | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |                                                                                      |
| (1) | (2)              | (3)                  | (4)                                                   | (5)                              | (6)                              | (7)        | (8)        | (9)               | (10)       | (11)       | (12)       | (13)                                                                                 |
| 1.  | Indeks Toleransi | -                    | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | C                                | BB                               | BB         | BB         | C (Buruk)         | -          | BB         | BB         | Sekretariat                                                                          |
|     |                  |                      | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | -                                | BB                               | BB         | BB         | CC Cukup Memadai) | -          | BB         | BB         | Sekretariat                                                                          |
| 2.  |                  |                      | Aspek Panca Gatra                                     | -                                | -                                | 5          | 5          | 0                 | -          | 5          | 5          | Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan |

Sumber : SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 000.7.2.2/30/SET-B Tahun 2024 tentang Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 - 2026

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang masih perlu disosialisasikan secara menyeluruh ke ASN agar setiap ASN mengetahui dan memahami variabel-variabel penilaian capaian reformasi birokrasi. Kategori C (Buruk) tersebut diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2021, sedangkan untuk penilaian Tahun 2022 hingga disusunnya laporan kinerja ini, belum ada.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai B (Baik) atau 66,95%. Kategori tersebut diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2021, sedangkan untuk penilaian Tahun 2022 hingga disusunnya laporan kinerja ini, belum ada.
3. Angka konflik Kota Singkawang ditargetkan 0 (tidak ada konflik). Kondisi ini menunjang terwujudnya Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran se Indonesia pada Tahun 2022. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya 2(dua) Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan harapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dapat mendukung terwujudnya tujuan sasaran pembangunan Kota Singkawang. Namun sayangnya, data kinerja dari Bidang Kesatuan Bangsa, khususnya pada Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik tidak ada, sehingga capaian kinerja berada pada kategori tidak ada data;
4. Tahun 2022 bukanlah tahun penyelenggaraan Pemilu Serentak, namun tahapan - tahapan persiapan, koordinasi dan komunikasi dengan KPU, BAWASLU dan instansi vertikal dilakukan jelang Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan diadakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan fokus pada pemilih pemula yaitu pelajar sekolah menengah atas yang berusia 17 tahun. Hal ini tentu saja belum mewakili perhitungan partisipasi pemilih untuk cakupan yang lebih luas seperti partisipasi pemilih perempuan, partisipasi pemilih penyandang disabilitas, partisipasi pemilih dari masing-masing unsur pemeluk agama maupun kelompok target lainnya. Namun sayangnya, data kinerja dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, khususnya pada Subkoordinator Politik Dalam Negeri tidak ada, sehingga capaian kinerja berada pada kategori tidak ada data;

- Persentase organisasi masyarakat sipil (OMS) aktif terdaftar pada Tahun ditargetkan sebesar 68%, namun hingga akhir Tahun 2022, data yang diperoleh menunjukkan jumlah OMS aktif terdaftar mencapai 117 OMS yang artinya penambahannya hanya berkisar 8,4% dari Tahun 2021. Rerata penambahan jumlah OMS aktif terdaftar dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022 hanya 47,86% sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**  
Capaian Kinerja Keormasan Tahun 2022

| Uraian                                 | Capaian Tahun |       |       |        |
|----------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|
|                                        | 2019          | 2020  | 2021  | 2022   |
| Jumlah                                 | 61            | 76    | 98    | 117    |
| Penambahan                             |               | 15    | 22    | 19     |
| %                                      |               | 19,74 | 22,45 | 16,23  |
| %Kenaikan dari Tahun 2019 - Tahun 2022 |               |       |       | 47,86% |

*Sumber : Analisis data Bidang Poldagrimas, 2022*

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan Pemerintahan Umum. Permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kewenangan belum sepenuhnya dilimpahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga pengukuran capaian kinerja kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang belum terukur secara jelas;
- Kewenangan baru tidak didukung dengan anggaran yang memadai, salahsatunya dikarenakan belum adanya kejelasan dan komitmen yang kuat untuk pelaksanaan tugas fungsi urusan pemerintahan umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Kebijakan penempatan sumberdaya aparatur dari Wali Kota Singkawang yang belum memperhatikan kebutuhan kompetensi ASN terutama ASN dengan keahlian (*skill*) menggunakan komputer. Hal ini mengakibatkan prosedur dan mekanisme penyelesaian pekerjaan belum optimal;
4. Walaupun sarana dan prasarana pelaksanaan tugas fungsi sudah terpenuhi dengan baik, namun dikarenakan ASN yang ada tidak memiliki kompetensi dan keahlian menggunakan komputer, aktivitas perkantoran menjadi lambat;
5. ASN yang minim kompetensi mengakibatkan tugas - tugas internal terhambat dan tidak mampu memenuhi target - target capaian kinerja yang ditetapkan dan hal ini terbukti dengan sulitnya memperoleh data kinerja dari masing - masing bidang pengampu tugas fungsi kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan organisasi kemasyarakatan;
6. Adanya kecenderungan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing - masing bidang bersifat berulang dan sama dari tahun ke tahun sehingga anggaran yang dialokasikan tidak digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
7. Konsekuensi dari pola kerja pada angka (6), data kinerja bidang sedikit sehingga argumentasi pengajuan penambahan anggaran program/kegiatan/subkegiatan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Singkawang minim yang disetujui;
8. Realisasi capaian reformasi birokrasi dan SAKIP masih dibawah target, sehingga pengalokasian anggaran pun semakin sulit untuk diperjuangkan.

Sedangkan identifikasi permasalahan setiap bidang sesuai dengan tugas pokok fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Permasalahan pada bidang kesatuan bangsa :**

Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2021, merupakan kebijakan lingkup Kota Singkawang yang memperkuat peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Kedua peraturan Wali Kota tersebut juga mengungkit variabel nilai tambah Pemerintah Kota Singkawang pada penilaian ditetapkan Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia oleh SETARA Institute. Konsekuensinya, Kota Singkawang menjadi *role model* implementasi toleransi di Indonesia dan menjadi referensi penerapan kebijakan publik yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan kebhinekaan.

Namun, tidak dipungkiri masih ditemukannya isu-isu strategis pelaksanaan tugas fungsi bidang kesatuan bangsa seperti :

1. Belum terbentuknya Satuan Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Kota Singkawang;
2. Minimnya kebijakan bidang kesatuan bangsa;
3. Belum tersedianya rencana aksi kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
4. Data kinerja bidang kesatuan bangsa masih minim;
5. Sejak ditetapkannya Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran se Indonesia pada Tahun 2022, ASN belum memberikan upaya - upaya untuk penyelarasan dan mempertahankan capaian tersebut dalam bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya toleransi di Kota Singkawang;
6. Masih kurangnya pemahaman, kesadaran dan pengalaman terhadap empat konsensus Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di masyarakat;
7. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini dan masih belum optimalnya kinerja forum-forum yang terbentuk dalam rangka deteksi dini, cegah dini bencana sosial dan bencana alam di masyarakat;
8. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat;
9. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban;
10. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas cenderung berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik;
11. Rendahnya upaya ASN dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal maupun sesama organisasi perangkat daerah;
12. Masih rendahnya kemampuan ASN dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat;
13. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan ASN dalam mengantisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal;
14. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan dikarenakan masih adanya yang menganggap bahwa toleransi berarti ikut merayakan perayaan agama tersebut walaupun berbeda dengan agama yang dianut;

15. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral subkoordinator ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
16. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral subkoordinator kewaspadaan diri dan penanganan konflik;

**b. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan :**

Jelang Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara bertahap dan terpadu berupaya melakukan intervensi tematik kegiatan yang ditujukan untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui program/kegiatan/subkegiatan.

Selain itu, masih dalam konteks keormasan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nomor : 473.2/16/PDINP-A dan Nomor : 220/205/KESBANGPOL-B tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam meningkatkan Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang tanggal 9 Maret 2022 dan berlaku hingga Tahun 2024.

Selanjutnya ditambahkan pula bahwa sejak Tahun 2020, Pemerintah Kota Singkawang terpilih sebagai salahsatu dari 8(delapan) pemerintahan daerah yang berminat menjadi mitra pada program kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan USAID MADANI. Penetapan Kota Singkawang sebagai Mitra Program USAID Tahun 2020 - 2024 berdasarkan surat FHI 360 Nomor 251/USAID-MADANI/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan menjadi Mitra Program USAID MADANI, maka Pemerintah Kota Singkawang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang melaksanakan penguatan organisasi masyarakat (OMS) di Kota Singkawang.

Sedangkan isu-isu strategis pelaksanaan tugas fungsi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, seperti :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
2. Masih terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda dikarenakan materi edukasi yang disampaikan belum sepenuhnya terkait kebijakan politik terbaru;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan organisasi kemasyarakatan;

4. Data kinerja bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan minim;
5. Kurangnya kesadaran pengurus Partai Politik penerima bantuan keuangan Partai Politik dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Masih ada beberapa partai yang tidak tepat waktu dan tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah yang di berikan kepada partai politik;
7. Masih adanya catatan dari BPK terhadap isi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan, akibat minimnya upaya asistensi dari ASN bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
8. Belum maksimal pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik terhadap persiapan pelaksanaan Pemilu;
9. Situasi politik terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, disharmonisasi antara Kepala Daerah dan DPRD belum diantisipasi;
10. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral subkoordinator politik dalam negeri dan subkoordinator organisasi kemasyarakatan;
11. Masih kurangnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat;
12. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan Organisasi masyarakatnya ke Mendagri Cq. Direktur Jenderal Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Indonesia Direktorat Ormas di Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Hasil review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2024, tidak dapat dijelaskan pada mengingat hingga diterbitkannya Renja Tahun 2024 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum memperoleh rancangan akhir RKPD Kota Singkawang Tahun 2024.

**Tabel 2.7 (T-C.31)**  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Pemerintah Kota Singkawang

| Kode       | Rancangan Akhir RKPD                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                      |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                      |                |                    | Catatan Penting                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Program / Kegiatan                                                                                                                                                | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program / Kegiatan                                                                                                                                                | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    | Target Capaian | Kebutuhan Dana     |                                                                                               |
| <b>02</b>  | <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                               | <b>Badan Kesbangpol</b> | <b>Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>                                                                                                           | <b>100%</b>    | <b>698.000.000</b> | <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                               | <b>Badan Kesbangpol</b> | <b>Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>                                                                                                           | <b>100%</b>    | <b>698.000.000</b> | Pelaksanaan Gatra Ideologi                                                                    |
| 02.01      | <i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i>                                                    | <b>Badan Kesbangpol</b> | <i>Persentase perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</i> | <b>100%</b>    | <b>698.000.000</b> | <i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i>                                                    | <b>Badan Kesbangpol</b> | <i>Persentase perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</i> | <b>100%</b>    | <b>698.000.000</b> | Pelaksanaan Gatra Ideologi                                                                    |
| 02.01.0002 | Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan | Badan Kesbangpol        | Jumlah kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.                                      | 1 dokumen      | 45.000.000         | Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan | Badan Kesbangpol        | Jumlah kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.                                      | 1 dokumen      | 45.000.000         | RAD GNRM                                                                                      |
| 02.01.0003 | Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan      | Badan Kesbangpol        | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.            | 400 orang      | 620.000.000        | Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan      | Badan Kesbangpol        | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.            | 400 orang      | 620.000.000        | HUT RI, Paskibra dan Duta Pancasila                                                           |
| 02.01.0004 | Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan     | Badan Kesbangpol        | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan .                      | 50 orang       | 15.000.000         | Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan     | Badan Kesbangpol        | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran                                                                               | 50 orang       | 15.000.000         | Facilitasi rakor pembauran kebangsaan dengan pilihan topik koordinasi terkait Pemilu Serentak |

| Kode       | Rancangan Akhir RKPD                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       | Catatan Penting                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
|            | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian | Pagu Indikatif        | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian | Kebutuhan Dana        |                                       |
| 02.01.0005 | Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan                                                                                                   | Badan Kesbangpol        | Jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.                                                                                                                      | 1 dokumen      | 13.000.000            | Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan                                                                                                   | Badan Kesbangpol        | Jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan                                                                                                                       | 1 dokumen      | 13.000.000            | Hibah FPK 10 juta dan pelaporan hibah |
| 02.01.0006 | Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.                                                                         | Badan Kesbangpol        | Jumlah dokumen hasil pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.                                                                           | 1 dokumen      | 5.000.000             | Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.                                                                         | Badan Kesbangpol        | Jumlah dokumen hasil pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.                                                                           | 1 dokumen      | 5.000.000             | Kaderisasi wasbang PAUD               |
| 03         | <b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>                                                                                                                                          | <b>Badan Kesbangpol</b> | <b>Persentase pelaksanaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</b>                                                                                                                                          | <b>100%</b>    | <b>18.064.631.957</b> | <b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>                                                                                                                                          | <b>Badan Kesbangpol</b> | <b>Persentase pelaksanaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</b>                                                                                                                                          | <b>100%</b>    | <b>18.064.631.957</b> | Pelaksanaan Gatra Politik             |
| 03.01      | <i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik</i> | <b>Badan Kesbangpol</b> | <i>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik</i> | <b>100%</b>    | <b>18.064.631.957</b> | <i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik</i> | <b>Badan Kesbangpol</b> | <i>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik</i> | <b>100%</b>    | <b>18.064.631.957</b> | Pelaksanaan Gatra Politik             |

| Kode       | Rancangan Akhir RKPD                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   | Catatan Penting                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian | Pagu Indikatif    | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian | Kebutuhan Dana    |                                                                                            |
| 03.01.0004 | Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah                         | 5 Kecamatan                            | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | 150 orang      | 75.000.000        | Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah                         | 5 Kecamatan                            | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | 150 orang      | 75.000.000        | Edukasi untuk peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula.                                      |
| 03.01.0005 | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | KPU, Bawaslu, TNI & POLRI) dan Parpol. | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah  | 2 laporan      | 17.989.631.957    | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | KPU, Bawaslu, TNI & POLRI) dan Parpol. | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah  | 2 laporan      | 17.989.631.957    | Pelaporan penggunaan Hibah dan Bankeu Pemilu (Hibah KPU, Bawaslu, TNI & POLRI) dan Parpol. |
| <b>04</b>  | <b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Badan Kesbangpol</b>                | <b>Persentase pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                               | 100%           | <b>47.500.000</b> | <b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Badan Kesbangpol</b>                | <b>Persentase pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                               | 100%           | <b>47.500.000</b> | Pelaksanaan Gatra Budaya, Sosial, dan Ekonomi                                              |
| 04.01      | <i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>                                                                                                                                                             | <b>Badan Kesbangpol</b>                | <i>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang</i>                                                                                                                                                                                                | 100%           | <b>47.500.000</b> | <i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>                                                                                                                                                             | <b>Badan Kesbangpol</b>                | <i>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang organisasi</i>                                                                                                                                                                                     | 100%           | <b>47.500.000</b> | Pelaksanaan Gatra Budaya, Sosial, dan Ekonomi                                              |

| Kode       | Rancangan Akhir RKPD                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                          |                |                   | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                          |                |                   | Catatan Penting                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|            | Program / Kegiatan                                                                                                                                                             | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        | Target Capaian | Pagu Indikatif    | Program / Kegiatan                                                                                                                                                             | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        | Target Capaian | Kebutuhan Dana    |                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                |                          | <b>pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>                                                                                                                             |                |                   |                                                                                                                                                                                |                          | <b>kemasyarakatan pemberdayaan dan pengawasan</b>                                                                                                                                        |                |                   |                                                 |
| 04.01.0003 | Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                         | Basement Kota Singkawang | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.       | 50 Orang       | 25.000.000        | Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                         | Basement Kota Singkawang | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.       | 50 Orang       | 25.000.000        | Festival Inovasi OMS (FIO)                      |
| 04.01.0004 | Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                        | Badan Kesbangpol         | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                  | 50 orang       | 15.000.000        | Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                        | Badan Kesbangpol         | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                  | 50 orang       | 15.000.000        | Asistensi IKO                                   |
| 04.01.0005 | Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. | OMS Kota Singkawang      | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. | 1 Laporan      | 7.500.000         | Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. | OMS Kota Singkawang      | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. | 1 Laporan      | 7.500.000         | Pelaporan OMS aktif untuk pemilihan OMS terbaik |
| <b>05</b>  | <b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>                                                                                                | Badan Kesbangpol         | <b>Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya</b>                                                                                     | <b>100%</b>    | <b>75.000.000</b> | <b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>                                                                                                | Badan Kesbangpol         | <b>Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya</b>                                                                                     | <b>100%</b>    | <b>75.000.000</b> | Pelaksanaan Gatra Ekonomi                       |

| Kode       | Rancangan Akhir RKPD                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                             |                |                   | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                             |                |                   | Catatan Penting                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian | Pagu Indikatif    | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian | Kebutuhan Dana    |                                                                                           |
| 05.01      | <b>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>                                                                                                                                                  | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>                                                                                             | <b>100%</b>    | <b>75.000.000</b> | <b>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>                                                                                                           | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>                                                                                             | <b>100%</b>    | <b>75.000.000</b> | Pelaksanaan Gatra Ekonomi                                                                 |
| 05.01.0005 | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.                                        | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. | 1 Laporan      | 75.000.000        | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. | 1 Laporan      | 75.000.000        | Hibah FKUB 72 juta dan fasilitasi koordinasi FKUB terkait Pemilu Serenta dan Kota Toleran |
| <b>06</b>  | <b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                         | Badan Kesbangpol | Persentase pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial                                                                                           | <b>100%</b>    | <b>77.172.756</b> | <b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                  | Badan Kesbangpol | Persentase pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial                                                                                           | <b>100%</b>    | <b>77.172.756</b> | Pelaksanaan Gatra Sosial                                                                  |
| 06.01      | <b>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>                                                                                                                                           | Badan Kesbangpol | <b>Persentase perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>                                                                                                  | <b>100%</b>    | <b>77.172.756</b> | <b>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>                                                                                                    | Badan Kesbangpol | <b>Persentase perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>                                                                                                  | <b>100%</b>    | <b>77.172.756</b> | Pelaksanaan Gatra Sosial                                                                  |
| 06.01.0003 | Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi, kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. | Badan Kesbangpol | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,                                                             | 50 orang       | 27,172.756        | Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi,                              | Badan Kesbangpol | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan                                                 | 50 orang       | 27,172.756        | Fasilitasi koordinasi FKDM Kecamatan dan Kelurahan                                        |

| Kode                                        | Rancangan Akhir RKPD                                                           |                         |                                                                                                                      |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                       |                         |                                                                                                             |                |                      | Catatan Penting |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|                                             | Program / Kegiatan                                                             | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                                                                    | Target Capaian | Pagu Indikatif       | Program / Kegiatan                                                             | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                                                           | Target Capaian | Kebutuhan Dana       |                 |
|                                             |                                                                                |                         | kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi, kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. |                |                      | kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.            |                         | perbatasan antar negara, fasilitasi, kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.    |                |                      |                 |
| 06.01.0006                                  | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                    | Badan Kesbangpol        | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah di Kabupaten/ Kota.                                | 1 dokumen      | 50.000.000           | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                    |                         | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah di Kabupaten/Kota.                        | 1 dokumen      | 50.000.000           | FORKOPIMDA      |
| <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> |                                                                                |                         |                                                                                                                      |                |                      |                                                                                |                         |                                                                                                             |                |                      |                 |
| 01                                          | <b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                            | <b>Badan Kesbangpol</b> | <b>Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                           | <b>100%</b>    | <b>2.722.012.581</b> | <b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                            | <b>Badan Kesbangpol</b> | <b>Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                  | <b>100%</b>    | <b>2.722.012.581</b> |                 |
| 02.01                                       | <b><i>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i></b> | <b>Badan Kesbangpol</b> | <b><i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i></b>          | <b>100%</b>    | <b>9.257.380</b>     | <b><i>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i></b> | <b>Badan Kesbangpol</b> | <b><i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i></b> | <b>100%</b>    | <b>9.257.380</b>     |                 |
| 02.01.0001                                  | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                | Badan Kesbangpol        | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                          | 1 dokumen      | 1.422.340            | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                | Badan Kesbangpol        | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                 | 1 dokumen      | 1.422.340            |                 |
| 02.01.0002                                  | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD                                     | Badan Kesbangpol        | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD                                     | 1 dokumen      | 1.634.740            | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD                                     | Badan Kesbangpol        | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD                            | 1 dokumen      | 1.634.740            |                 |
| 02.01.0003                                  | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                           | Badan Kesbangpol        | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                 | 1 dokumen      | 1.422.340            | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                           | Badan Kesbangpol        | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD        | 1 dokumen      | 1.422.340            |                 |

| Kode         | Rancangan Akhir RKPD                                                                  |                  |                                                                                                                                                                        |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                              |                  |                                                                                                                                                                        |                |                      | Catatan Penting |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|              | Program / Kegiatan                                                                    | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif       | Program / Kegiatan                                                                    | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian | Kebutuhan Dana       |                 |
| 02.01.0004   | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD                                                    | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 dokumen      | 1.683.120            | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD                                                    | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 dokumen      | 1.683.120            |                 |
| 02.01.0005   | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD                                          | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 dokumen      | 1.411.720            | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD                                          | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 dokumen      | 1.411.720            |                 |
| 02.01.0006   | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 dokumen      | 1.683.120            | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 dokumen      | 1.683.120            |                 |
| <b>02.02</b> | <b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                         | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                                                                                   | <b>100%</b>    | <b>2.187.828.848</b> | <b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                         | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                                                                                   | <b>100%</b>    | <b>2.187.828.848</b> |                 |
| 02.02.0001   | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                     | Badan Kesbangpol | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                      | 20 orang       | 2.085.188.808        | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                     | Badan Kesbangpol | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                      | 20 orang       | 2.085.188.808        |                 |
| 02.02.0002   | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                         | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                                                                                     | 4 dokumen      | 101.520.000          | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                         | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                                                                                     | 4 dokumen      | 101.520.000          |                 |
| 02.02.0005   | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD                                        | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                                             | 1 laporan      | 1.120.040            | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD                                        | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                                             | 1 laporan      | 1.120.040            |                 |

| Kode         | Rancangan Akhir RKPD                                              |                  |                                                                                      |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan                                          |                  |                                                                                      |                |                    | Catatan Penting |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|              | Program / Kegiatan                                                | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                    | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program / Kegiatan                                                | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                    | Target Capaian | Kebutuhan Dana     |                 |
| <b>02.03</b> | <b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>     | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b> | <b>100%</b>    | <b>4.500.000</b>   | <b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>     | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b> | <b>100%</b>    | <b>4.500.000</b>   |                 |
| 02.03.0005   | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD     | 1 laporan      | 4.500.000          | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD     | 1 laporan      | 4.500.000          |                 |
| <b>02.05</b> | <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                  | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>              | <b>100%</b>    | <b>4.200.000</b>   | <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                  | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>              | <b>100%</b>    | <b>4.200.000</b>   |                 |
| 02.05.0005   | Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai               | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai                   | 12 dokumen     | 4.200.000          | Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai               | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai                   | 12 dokumen     | 4.200.000          |                 |
| <b>02.06</b> | <b>Administrasi umum perangkat daerah</b>                         | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>                     | <b>100%</b>    | <b>315.720.213</b> | <b>Administrasi umum perangkat daerah</b>                         | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>                     | <b>100%</b>    | <b>315.720.213</b> |                 |
| 02.06.0001   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | Badan Kesbangpol | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan   | 1 paket        | 2.523.500          | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | Badan Kesbangpol | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan   | 1 paket        | 2.523.500          |                 |
| 02.06.0002   | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | Badan Kesbangpol | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                       | 5 Paket        | 33.795.170         | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | Badan Kesbangpol | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                       | 5 Paket        | 33.795.170         |                 |
| 02.06.0004   | Penyediaan bahan logistik kantor                                  | Badan Kesbangpol | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                   | 2 paket        | 9.909.720          | Penyediaan bahan logistik kantor                                  | Badan Kesbangpol | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                   | 2 paket        | 9.909.720          |                 |
| 02.06.0005   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | Badan Kesbangpol | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                          | 3 Paket        | 7.500.000          | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | Badan Kesbangpol | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                          | 3 Paket        | 7.500.000          |                 |

| Kode         | Rancangan Akhir RKPD                                                                                            |                  |                                                                                                        |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                        |                  |                                                                                                        |                |                    | Catatan Penting |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|              | Program / Kegiatan                                                                                              | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program / Kegiatan                                                                                              | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian | Kebutuhan Dana     |                 |
| 02.06.0006   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                        | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                           | 36 dokumen     | 3.469.200          | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                        | Badan Kesbangpol | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                           | 36 dokumen     | 3.469.200          |                 |
| 02.06.0008   | Fasilitasi kunjungan tamu                                                                                       | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu                                                               | 1 laporan      | 8.522.623          | Fasilitasi kunjungan tamu                                                                                       | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu                                                               | 1 laporan      | 8.522.623          |                 |
| 02.06.0009   | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                            | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | 15 laporan     | 250.000.000        | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                            | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | 15 laporan     | 250.000.000        |                 |
| <b>02.08</b> | <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                                     | Badan Kesbangpol | <b>Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                 | <b>100%</b>    | <b>155.756.140</b> | <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                                     | Badan Kesbangpol | <b>Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                 | <b>100%</b>    | <b>155.756.140</b> |                 |
| 02.08.0001   | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                  | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                          | 2 laporan      | 1.226.500          | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                  | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                          | 2 laporan      | 1.226.500          |                 |
| 02.08.0002   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                         | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan                  | 12 laporan     | 77.640.000         | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                         | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan                  | 12 laporan     | 77.640.000         |                 |
| 02.08.0004   | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                           | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor                                                              | 12 laporan     | 76.889.640         | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                           | Badan Kesbangpol | Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor                                                              | 12 laporan     | 76.889.640         |                 |
| <b>02.09</b> | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                      | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                  | <b>100%</b>    | <b>44.750.000</b>  | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                      | Badan Kesbangpol | <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                  | <b>100%</b>    | <b>44.750.000</b>  |                 |
| 02.09.0002   | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Badan Kesbangpol | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 1 unit         | 39.750.000         | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Badan Kesbangpol | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 1 unit         | 39.750.000         |                 |
| 02.09.0006   | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                        | Badan Kesbangpol | Jumlah peralatan dan mesin lainnya                                                                     | 14 Unit        | 5.000.000          | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                        | Badan Kesbangpol | Jumlah peralatan dan mesin lainnya                                                                     | 14 Unit        | 5.000.000          |                 |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang menjaring kebutuhan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan di Tahun 2024. Adapun masukan atau usulan yang berimplikasi langsung pada kegiatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.8 (T-C.32)**  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Pemerintah Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| No  | Program/Kegiatan                                                                                                                       | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                                                                                                             | Besaran/Volume                                             | Catatan                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                    | (3)             | (4)                                                                                                                                                           | (5)                                                        | (6)                                                               |
| 1.  | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Kota Singkawang | Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan                                                                           | 1 aspek ideologi dari 5 aspek panca gatra yang ditargetkan | - Duta Pancasila;<br>- Kemah kebangsaan.                          |
| 2.  | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Kota Singkawang | Persentase pelaksanaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 1 aspek politik dari 5 aspek panca gatra yang ditargetkan  | - Asistensi pertanggungjawaban bantuan keuangan;<br>- Duta Pemilu |
| 3.  | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Kota Singkawang | Persentase pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan                                                                          | 1 aspek sosial dari 5 aspek panca gatra yang ditargetkan   | - Festival Inovasi OMS;<br>- Forum OMS                            |
| 4.  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | Kota Singkawang | Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya                                                                 | 1 aspek ekonomi dari 5 aspek panca gatra yang ditargetkan  | - Fasilitasi FPK;<br>- Fasilitasi FKDM;                           |
| 5.  | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Kota Singkawang | Persentase pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial                             | 1 aspek sosial dari 5 aspek panca gatra                    | - Fasilitasi TKDD;<br>- Pengawasan orang/lembaga asing            |

Sumber : Forum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

### **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026 juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan - kebijakan lingkup nasional dan provinsi.

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang secara struktural dibawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada Tahun 2024 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain:

1. Tahun 2024 merupakan tahun pesta demokrasi akbar bagi rakyat Indonesia. yang akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak. Hari pemungutan suara itu dihelat bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI;
2. Kualitas demokrasi, hal ini teridentifikasi bahwa nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum;
3. Rekomendasi tindak lanjut penanganan segera jika terdapat potensi permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap terganggunya kelancaran penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 secara *rigid* belum terpadu;
4. Adanya kecenderungan peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;

5. Kecenderungan peningkatan konflik sosial, isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa;
6. Adanya warga negara Indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok yang diduga merupakan gerakan terorisme/radikalisme sehingga perlu upaya-upaya antisipasi nyata;
7. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai;
8. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
9. Pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi yang ditandai dari semakin lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosialnya;
10. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang melakukan penelurusan dan *cascading* kinerja. Hal ini ditujukan untuk memperoleh keterhubungan antara kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berubah. Perubahan kebijakan ini bermula dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian diikuti dengan adanya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, sejak diterbitkannya Keputusan Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta

dengan diterbitkannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kota Singkawang dengan cara meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan.

**Tabel 3.1**  
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Perubahan  
RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026

| Tujuan Pemerintah Kota Singkawang                                                                                                       | Sasaran Pemerintah Kota Singkawang                                                        | Indikator Tujuan/ Sasaran | Strategi                                    | Arah Kebijakan                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi | Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya | Indeks Toleransi          | Peningkatan ideologi dan wawasan kebangsaan | Meningkatkan edukasi Pancasila dan cinta tanah air serta wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat |

Sumber : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah dan sasaran "**Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik**" Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kemudian menetapkan sebanyak 2(dua) sasaran dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran ditetapkan sebanyak 3(tiga) indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) Sasaran ke-I ” **Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” dengan indikator sasaran sebagai berikut :
  - 1) Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
  - 2) Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah.
- 2) Sasaran ke-II ” **Meningkatnya wawasan nusantara**” dengan indikator sasaran sebagai berikut :
  - 1) Aspek Pancagatra

Terkait hal tersebut, tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga Tahun 2023 - 2026 tercantum pada Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 29 Tahun 2023 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
Keterkaitan Tujuan RPD dan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 - 2026  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

| Tujuan RPD<br>Pemerintah Kota<br>Singkawang                                                                                                                        | Indikator<br>Tujuan<br>RPD | Tujuan<br>Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik                                                              | Indikator<br>Tujuan<br>Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik                                                 | Sasaran                                                                | Indikator                                     | Penjelasan                                                                                              | Target kinerja |      |      |      | Akhir<br>Renstra |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------------------|
|                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                        |                                               |                                                                                                         | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 |                  |
| Meningkatnya<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>yang baik melalui<br>penguatan fungsi<br>pelayanan publik<br>yang berbasis<br>inovasi dan<br>teknologi<br>informasi | Indeks<br>Toleransi        | Meningkatnya<br>kualitas<br>kehidupan<br>masyarakat<br>yang<br>harmonis,<br>kondusif,<br>toleran dan<br>berbudaya | Potensi<br>kejadian<br>konflik<br>terkait<br>ideologi,<br>politik,<br>ekonomi,<br>sosial<br>budaya, dan<br>hankam | Meningkatnya<br>reformasi<br>birokrasi dan<br>akuntabilitas<br>kinerja | Kategori<br>capaian<br>reformasi<br>birokrasi | Kategori capaian<br>reformasi birokrasi<br><br>Hasil evaluasi RB<br>oleh Inspektorat<br>Kota Singkawang | BB             | BB   | BB   | BB   | BB               |
|                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                        | Kategori<br>capaian<br>SAKIP                  | Kategori capaian<br>SAKIP<br><br>Hasil evaluasi SAKIP<br>oleh Inspektorat<br>Kota Singkawang            | BB             | BB   | BB   | BB   | BB               |
|                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                   | Meningkatnya<br>wawasan<br>nusantara                                   | Aspek<br>Panca Gatra                          | Penerapan 5(lima)<br>aspek panca gatra<br><br>Tipe pengukuran :<br>Kumulatif                            | -              | 5    | 5    | 5    | 5                |

**Tabel 3.3**  
Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 - 2026  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

| No | Tujuan<br>Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik                                            | Indikator<br>Tujuan<br>Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik                      | Sasaran                                                    | Indikator                            | Penjelasan                                                                                                                                                                                          | Target Kinerja Pada Tahun |      |      |      | Akhir<br>Renstra | Pengampu                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                           |                                                                                        |                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                     | 2023                      | 2024 | 2025 | 2026 |                  |                                    |
| 1  | 2                                                                                         | 3                                                                                      | 4                                                          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                   | 7                         | 8    | 9    | 10   | 11               | 12                                 |
| 1. | Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya | Potensi kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam | Meningkatnya reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja | Kategori capaian reformasi birokrasi | Kategori capaian reformasi birokrasi<br><br>Hasil evaluasi RB oleh Inspektorat Kota Singkawang                                                                                                      | BB                        | BB   | BB   | BB   | BB               | Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset  |
|    |                                                                                           |                                                                                        |                                                            | Kategori capaian SAKIP               | Kategori capaian SAKIP<br><br>Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang                                                                                                                 | BB                        | BB   | BB   | BB   | BB               | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah |
|    |                                                                                           |                                                                                        | Meningkatnya wawasan nusantara                             | Aspek Panca Gatra                    | Ideologi.<br>Kini Ideologi Pancasila dan Konstitusi menghadapi tantangan kewaspadaan dengan maraknya kembali ideologi ekstrim khilafah dan komunis serta gerak politik kelompok oligark yang rakus; | -                         | 1    | 1    | 1    | 1                | Bidang Kesatuan Bangsa             |

| No | Tujuan<br>Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik | Indikator<br>Tujuan<br>Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik | Sasaran | Indikator | Penjelasan                                                                                                                                                                                              | Target Kinerja Pada Tahun |      |      |      | Akhir<br>Renstra | Pengampu               |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|------------------------|
|    |                                                |                                                                   |         |           |                                                                                                                                                                                                         | 2023                      | 2024 | 2025 | 2026 |                  |                        |
| 1  | 2                                              | 3                                                                 | 4       | 5         | 6                                                                                                                                                                                                       | 7                         | 8    | 9    | 10   | 11               | 12                     |
|    |                                                |                                                                   |         |           | Ekonomi.<br>Kondisi ekonomi nasional pasca Covid-19 menghasilkan kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar, beban hutang yang semakin memberatkan yang belum ada jalan penyelesaian tepat dan strategis; | -                         | 1    | 1    | 1    | 1                | Bidang Kesatuan Bangsa |
|    |                                                |                                                                   |         |           | Budaya.<br>Terkikisnya budaya bangsa yang mengedepankan sifat gotong-royong, rasa saling menghormati dan menghargai sebagai sesama anak bangsa;                                                         | -                         | 1    | 1    | 1    | 1                | Bidang Kesatuan Bangsa |
|    |                                                |                                                                   |         |           | Sosial.<br>Kondisi permasalahan sosial yang dapat mengarah ke konflik sosial, karena dipicu dari lemahnya ideologi, perbedaan pilihan politik, kesenjangan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum.        | -                         | 1    | 1    | 1    | 1                | Bidang Kesatuan Bangsa |

| No | Tujuan<br>Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik | Indikator<br>Tujuan<br>Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik | Sasaran | Indikator | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                     | Target Kinerja Pada Tahun |      |      |      | Akhir<br>Renstra | Pengampu                                                              |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                |                                                                   |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                | 2023                      | 2024 | 2025 | 2026 |                  |                                                                       |
| 1  | 2                                              | 3                                                                 | 4       | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                              | 7                         | 8    | 9    | 10   | 11               | 12                                                                    |
|    |                                                |                                                                   |         |           | Politik.<br>NKRI menghadapi<br>tantangan<br>kewaspadaan,<br>pecahnya persatuan<br>dan kesatuan bangsa,<br>karena maraknya<br>tuduhan politik<br>identitas yang<br>menebarkan <i>divide et<br/>impera</i> (memecah belah<br>dan mengadu domba); | -                         | 1    | 1    | 1    | 1                | Bidang Politik<br>Dalam Negeri<br>dan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan |

Pengampu pencapaian target kinerja tentu saja memiliki keleluasaan dan keterkaitan antarbidang dan bahkan pelibatan lintas perangkat daerah. Hal ini dikarenakan bukanlah perkara gampang dalam melakukan mitigasi dan antisipasi agar kondisi masyarakat selalu terjaga dan saling toleran satu dengan yang lain.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan daerah.

Program, kegiatan dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang disusun dengan memperhatikan di Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 ini berdasarkan analisa kebijakan dengan memperhatikan :

1. Perubahan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Keselarasan dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kota Singkawang;
3. Prioritas program bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Usulan - usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.;
5. Penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses DPRD.

Penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka disusunlah prioritas rencana program/kegiatan/subkegiatan Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang direncanakan :

Beberapa kegiatan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yaitu :

#### **1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

1. *Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan*
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
4. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
5. Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

2. *Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan*
6. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.

## **3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

3. *Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan*

8. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
9. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
10. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.

#### **4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

4. *Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya*
11. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.

#### **5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

5. *Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial*
12. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi, kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
13. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

6. *Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*
14. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
15. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
16. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
17. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;

18. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD;
19. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
7. *Administrasi keuangan perangkat daerah*
  20. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  21. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  22. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD.
8. *Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*
  23. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD.
9. *Administrasi kepegawaian perangkat daerah*
  24. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai.
10. *Administrasi umum perangkat daerah*
  25. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  26. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  27. Penyediaan bahan logistik kantor;
  28. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  29. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  30. Fasilitasi kunjungan tamu;
  31. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
11. *Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*
  32. Penyediaan jasa surat menyurat;
  33. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  34. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
12. *Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*
  35. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  36. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

**Tabel 3.1 (T-C.33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan/Subkegiatan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Pemerintah Kota Singkawang - Provinsi Kalimantan Barat**

| Kode         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                                                              | Rencana Tahun 2024      |                        |                               |             | Catatan Penting                                                                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | Lokasi                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber dana |                                                                                               | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)          | (2)                                                                                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                                         | (4)                     | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)                                                                                           | (9)                               | (10)                          |
| <b>02</b>    | <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                               | <b>Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>                                                                                                                  | <b>Badan Kesbangpol</b> | <b>100%</b>            | <b>698.000.000</b>            | APBD        | Pelaksanaan Gatra Idelogi                                                                     | <b>100%</b>                       | 730.000.000                   |
| <i>02.01</i> | <b>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>                                                    | <i><b>Persentase perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</b></i> | <b>Badan Kesbangpol</b> | <b>100%</b>            | <b>698.000.000</b>            | APBD        | Pelaksanaan Gatra Idelogi                                                                     | <b>100%</b>                       | 730.000.000                   |
| 02.01.0002   | Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan | Jumlah kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.                                             | Badan Kesbangpol        | 1 dokumen              | 45.000.000                    | APBD        | RAD GNRM                                                                                      | 1 dokumen                         | 35.000.000                    |
| 02.01.0003   | Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan      | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.                   | Badan Kesbangpol        | 400 orang              | 620.000.000                   | APBD        | HUT RI, Paskibra dan Duta Pancasila                                                           | 400 orang                         | 650.000.000                   |
| 02.01.0004   | Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan     | Jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.                    | Badan Kesbangpol        | 50 orang               | 15.000.000                    | APBD        | Fasilitasi rakor pembauran kebangsaan dengan pilihan topik koordinasi terkait Pemilu Serentak | 50 orang                          | 45.000.000                    |

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tahun 2024   |                        |                               |             | Catatan Penting                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber dana |                                                                   | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)        | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (4)                  | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)                                                               | (9)                               | (10)                          |
| 02.01.0005 | Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan                                                                                                   | Jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.                                                                                                                             | Badan Kesbangpol     | 1 Laporan              | 13.000.000                    | APBD        | Hibah FPK dan pelaporan hibah dan koordinasi pembauran kebangsaan | 1 Laporan                         | 150.000.000                   |
| 02.01.0006 | Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.                                                                         | Jumlah dokumen hasil pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.                                                                                  | Badan Kesbangpol     | 1 dokumen              | 5.000.000                     | APBD        | Kaderisasi wasbang PAUD                                           | 1 dokumen                         | 55.000.000                    |
| <b>03</b>  | <b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>                                                                                                                                          | <b>Persentase pelaksanaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</b>                                                                                                                                                 | Badan Kesbangpol     | <b>100%</b>            | <b>18.064.631.957</b>         | APBD        | Pelaksanaan Gatra Politik                                         | <b>100%</b>                       | <b>4.257.000.000</b>          |
| 03.01      | <b>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik</b> | <b><i>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik</i></b> | Badan Kesbangpol     | <b>100%</b>            | <b>18.064.631.957</b>         | APBD        | Pelaksanaan Gatra Politik                                         | <b>100%</b>                       | 4.162.000.000                 |
| 03.01.0004 | Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan                                                                                                                                  | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi                                                                                                                                                                             | 5 Sekolah SMA/SMK/MA | 150 orang              | 75.000.000                    | APBD        | Edukasi untuk peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula              | 200 orang                         | 95.000.000                    |

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Tahun 2024                     |                        |                               |             | Catatan Penting                                                                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber dana |                                                                                            | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)        | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)                                    | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)                                                                                        | (9)                               | (10)                          |
|            | partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah                                                                                                                                                                               | kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.                                                                                                                                        |                                        |                        |                               |             |                                                                                            |                                   |                               |
| 03.01.0005 | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | KPU, Bawaslu, TNI & POLRI) dan Parpol. | 2 laporan              | 17.989.631.957                | APBD        | Pelaporan penggunaan Hibah dan Bankeu Pemilu (Hibah KPU, Bawaslu, TNI & POLRI) dan Parpol. | 2 laporan                         | 4.162.000.000                 |
| <b>04</b>  | <b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Persentase pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Badan Kesbangpol</b>                | <b>100%</b>            | <b>47.500.000</b>             | APBD        | Pelaksanaan Gatra Budaya, Sosial, dan Ekonomi                                              | <b>100%</b>                       | <b>140.000.000</b>            |
| 04.01      | <b><i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i></b>                                                                                                                                                      | <b><i>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i></b>                                                                                                                                  | Badan Kesbangpol                       | <b>100%</b>            | <b>47.500.000</b>             | APBD        | <i>Cost-sharing</i> USAID Madani                                                           | <b>100%</b>                       | <b>140.000.000</b>            |
| 04.01.0003 | Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                                                                                                                                | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                                                                                                       | <i>Basement</i> Kota Singkawang        | 50 Orang               | 25.000.000                    | APBD        | Festival Inovasi OMS (FIO)                                                                 | 50 Orang                          | 25.000.000                    |
| 04.01.0004 | Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                                                                                                                               | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                                                                                                                  | Badan Kesbangpol                       | 50 orang               | 15.000.000                    | APBD        | Asistensi IKO                                                                              | 50 orang                          | 90.000.000                    |

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                                                                                | Rencana Tahun 2024   |                        |                               |             | Catatan Penting                                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber dana |                                                                                    | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)        | (2)                                                                                                                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                                           | (4)                  | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)                                                                                | (9)                               | (10)                          |
| 04.01.0005 | Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                                       | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.                                      | OMS Kota Singkawang  | 1 Laporan              | 7.500.000                     | APBD        | Pelaporan OMS aktif untuk pemilihan OMS terbaik                                    | 1 Laporan                         | 25.000.000                    |
| <b>05</b>  | <b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>                                                                                                                                      | <b>Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya</b>                                                                                                                          | Badan Kesbangpol     | <b>100%</b>            | <b>75.000.000</b>             | APBD        | <b>Pelaksanaan Gatra Budaya</b>                                                    | <b>100%</b>                       | <b>120.000.000</b>            |
| 05.01      | <i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>                                                                                                             | <i>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>                                                                                               | Badan Kesbangpol     | <b>100%</b>            | <b>75.000.000</b>             | APBD        | <b>Pelaksanaan Gatra Budaya</b>                                                    | <b>100%</b>                       | <b>120.000.000</b>            |
| 05.01.0005 | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. | FKUB Kota Singkawang | 1 Laporan              | 75.000.000                    | APBD        | Hibah FKUB dan fasilitasi koordinasi FKUB terkait Pemilu Serentak dan Kota Toleran | 1 Laporan                         | 120.000.000                   |
| <b>06</b>  | <b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                    | <b>Persentase pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</b>                                                                                      | Badan Kesbangpol     | <b>100%</b>            | <b>77.172.756</b>             | APBD        | <b>Pelaksanaan Gatra Sosial</b>                                                    | <b>100%</b>                       | <b>87.172.756</b>             |
| 06.01      | <i>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>                                                                                                      | <i>Persentase perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>                                                                                                    | Badan Kesbangpol     | <b>100%</b>            | <b>77.172.756</b>             | APBD        | <b>Pelaksanaan Gatra Sosial</b>                                                    | <b>100%</b>                       | <b>87.172.756</b>             |
| 06.01.0003 | Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga                                                                                        | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja                                                                                        | Badan Kesbangpol     | 50 orang               | 27,172.756                    | APBD        | Fasilitasi koordinasi FKDM Kecamatan dan Kelurahan                                 | 100 orang                         | 37.172..756                   |

| Kode                                        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                | Rencana Tahun 2024 |                        |                               |             | Catatan Penting          | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                               | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber dana |                          | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)                                         | (2)                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                           | (4)                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)                      | (9)                               | (10)                          |
|                                             | asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi, kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. | asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi, kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. |                    |                        |                               |             |                          |                                   |                               |
| 06.01.0006                                  | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah di Kabupaten/Kota.                                                          | Badan Kesbangpol   | 1 dokumen              | 50.000.000                    | APBD        | Forkopimda tahunan       | 1 dokumen                         | 50.000.000                    |
| <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> |                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                    |                        |                               |             |                          |                                   |                               |
| <b>01</b>                                   | <b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                                                         | Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah .                                                                         | Badan Kesbangpol   | 1 dokumen              | <b>2.722.012.581</b>          | APBD        | <b>Pengeluaran rutin</b> | <b>100%</b>                       |                               |
| <b>02.01</b>                                | <b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>                                                     | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                 | Badan Kesbangpol   | 1 dokumen              | <b>9.257.380</b>              | APBD        |                          | <b>100%</b>                       |                               |
| 02.01.0001                                  | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                             | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                   | Badan Kesbangpol   | 1 dokumen              | 1.422.340                     | APBD        |                          | 1 dokumen                         | 1.500.000                     |
| 02.01.0002                                  | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD                                                                                  | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD                                                              | Badan Kesbangpol   | 1 dokumen              | 1.634.740                     | APBD        |                          | 1 dokumen                         | 1.500.000                     |
| 02.01.0003                                  | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                                                                        | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                                          | Badan Kesbangpol   | 1 dokumen              | 1.422.340                     | APBD        |                          | 1 dokumen                         | 1.200.000                     |
| 02.01.0004                                  | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD                                                                                          | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD                                                              | Badan Kesbangpol   | 1 dokumen              | 1.683.120                     | APBD        |                          | 1 dokumen                         | 1.500.000                     |
| 02.01.0005                                  | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD                                                                                | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD                                          | Badan Kesbangpol   | 1 dokumen              | 1.411.720                     | APBD        |                          | 1 dokumen                         | 1.500.000                     |
| 02.01.0006                                  | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                       | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi                                               | Badan Kesbangpol   | 1 dokumen              | 1.683.120                     | APBD        |                          | 2 laporan                         | 5.500.000                     |

| Kode         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                             | Rencana Tahun 2024 |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                   |                                                                                                                            | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)          | (2)                                                               | (3)                                                                                                                        | (4)                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                          |
|              |                                                                   | penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                     | Badan Kesbangpol   |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
| <b>02.02</b> | <b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>                     | <b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                                       | Badan Kesbangpol   | <b>100%</b>            | <b>2.187.828.848</b>          | APBD        |                 | <b>100%</b>                       | <b>2.900.000.000</b>          |
| 02.02.0001   | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                 | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                          | Badan Kesbangpol   | 20 orang               | 2.085.188.808                 | APBD        |                 | 26 orang                          | 2.800.000.000                 |
| 02.02.0002   | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                     | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                                         | Badan Kesbangpol   | 4 dokumen              | 101.520.000                   | APBD        |                 | 4 dokumen                         | 96.000.000                    |
| 02.02.0005   | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD                    | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Badan Kesbangpol   | 1 laporan              | 1.120.040                     | APBD        |                 | 1 laporan                         | 1.000.000                     |
| <b>02.03</b> | <b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>     | <b>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>                                       | Badan Kesbangpol   | <b>100%</b>            | <b>4.500.000</b>              | APBD        |                 | <b>100%</b>                       | <b>5.500.000</b>              |
| 02.03.0005   | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD                                           | Badan Kesbangpol   | 1 laporan              | 4.500.000                     | APBD        |                 | 1 laporan                         | <b>5.500.000</b>              |
| <b>02.05</b> | <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                  | <b>Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                                                    | Badan Kesbangpol   | <b>100%</b>            | <b>4.200.000</b>              | APBD        |                 | <b>100%</b>                       | <b>5.200.000</b>              |
| 02.05.0005   | Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai               | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai                                                         | Badan Kesbangpol   | 12 dokumen             | 4.200.000                     | APBD        |                 | 12 dokumen                        | 5.200.000                     |
| <b>02.06</b> | <b>Administrasi umum perangkat daerah</b>                         | <b>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>                                                           | Badan Kesbangpol   | <b>100%</b>            | <b>315.720.213</b>            | APBD        |                 |                                   |                               |
| 02.06.0001   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                                         | Badan Kesbangpol   | 1 paket                | 2.523.500                     | APBD        |                 | 1 paket                           | 5.200.000                     |
| 02.06.0002   | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                             | Badan Kesbangpol   | 5 Paket                | 33.795.170                    | APBD        |                 | 5 Paket                           | 25.000.000                    |

| Kode                                                                 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                         | Rencana Tahun 2024 |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)                                                                  | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                    | (4)                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                          |
| 02.06.0004                                                           | Penyediaan bahan logistik kantor                                                                                | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                                     | Badan Kesbangpol   | 2 paket                | 9.909.720                     | APBD        |                 | 2 paket                           | 7.000.000                     |
| 02.06.0005                                                           | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                                       | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                            | Badan Kesbangpol   | 3 Paket                | 7.500.000                     | APBD        |                 | 3 Paket                           | 8.000.000                     |
| 02.06.0006                                                           | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                        | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                           | Badan Kesbangpol   | 36 dokumen             | 3.469.200                     | APBD        |                 | 36 dokumen                        | 3.600.000                     |
| 02.06.0008                                                           | Fasilitasi kunjungan tamu                                                                                       | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu                                                               | Badan Kesbangpol   | 1 laporan              | 8.522.623                     | APBD        |                 | 1 laporan                         | 1.500.000                     |
| 02.06.0009                                                           | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                            | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | Badan Kesbangpol   | 15 laporan             | 250.000.000                   | APBD        |                 | 15 laporan                        | 300.000.000                   |
| <b>02.08</b>                                                         | <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                                     | <b>Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                 | Badan Kesbangpol   | <b>100%</b>            | <b>155.756.140</b>            | APBD        |                 | <b>100%</b>                       | <b>159.691.960</b>            |
| 02.08.0001                                                           | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                          | Badan Kesbangpol   | 2 laporan              | 1.226.500                     | APBD        |                 | 2 laporan                         | 1.400.000                     |
| 02.08.0002                                                           | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan                  | Badan Kesbangpol   | 12 laporan             | 77.640.000                    | APBD        |                 | 12 laporan                        | 78.000.000                    |
| 02.08.0004                                                           | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                           | Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor                                                              | Badan Kesbangpol   | 12 laporan             | 76.889.640                    | APBD        |                 | 12 laporan                        | 80.291.960                    |
| <b>02.09</b>                                                         | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                      | <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                  | Badan Kesbangpol   | <b>100%</b>            | <b>44.750.000</b>             | APBD        |                 |                                   | 48.390.000                    |
| 02.09.0002                                                           | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Badan Kesbangpol   | 1 unit                 | 39.750.000                    | APBD        |                 | 1 unit                            | 40.390.000                    |
| 02.09.0006                                                           | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya                                                                     | Badan Kesbangpol   | 14 Unit                | 5.000.000                     | APBD        |                 | 14 Unit                           | 8.000.000                     |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN PROGRAM PRIORITAS + PROGRAM PENUNJANG (Rp)</b> |                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                        | <b>21.684.317.294</b>         |             |                 |                                   |                               |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Rencana kerja (dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 guna mendukung prioritas pembangunan Kota Singkawang, serta prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun untuk pemenuhan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2024 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dengan uraian fungsi berikut:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- b) pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- c) pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;

- d) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- e) pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f) pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1. Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang mendukung Prioritas Provinsi Kalimantan Barat**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, termasuk Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang terkait tugasnya dalam membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pelaksanaan tugas ini tidak secara langsung mendukung Prioritas Pemerintah Kota Singkawang, namun dalam kaitan pencapaian Program prioritas pembangunan dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Singkawang. Baik dilaksanakan secara langsung maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **4.2. Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang**

Berdasarkan uraian Bab III sebelumnya, dapat diinformasikan bahwa rencana kerja dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024, secara garis besar mengoptimalkan peran serta forum, organisasi masyarakat dan lintas sektoral untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Adapun total pagu yang diajukan sebesar **Rp 21.684.317.294,-**.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan, memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih bersifat indikatif. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk dilakukan berbagai perubahan dan perbaikan terhadap rencana kerja tersebut. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 disusun berdasarkan rancangan RKPD Tahun 2024 dan merupakan tahapan awal yang menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026.

Dokumen ini memuat perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah sebagaimana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Singkawang.

Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target perangkat daerah serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang secara bersama - sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara RPD, RENSTRA dan RKPD;
3. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini memuat kondisi yang ingin dicapai selama satu tahun yang berfungsi sebagai acuan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026. Namun demikian, kelak dalam pelaksanaannya masih dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian.

Akhir kata, diharapkan pelaksanaan tugas-tugas ASN dapat terkoordinir dan terkendali, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Singkawang, 29 Mei 2023

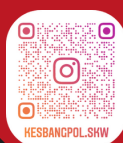
Pt. Kepala Badan,



**Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196401291984021002



**RENJA BADAN KESBANGPOL  
TAHUN 2024**